

## PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAK EKONOMI PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA: SEBUAH KAJIAN PUSTAKA

*(Covid-19 Pandemic and Its Economic Impact on Indonesian Migrant Workers and Their Families: A Literature Review)*

Mita Noveria\* dan Haning Romdiati\*\*

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Widya Graha LIPI Lt. 10, Jl. Jenderal Gatot Subroto 10, Jakarta, Indonesia

\*Email: mitanoveria.lipi@gmail.com dan \*\*hromdiati@yahoo.com

Naskah diterima: 9 November 2020

Naskah direvisi: 13 November 2020

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2022

### Abstract

*The Coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic negatively impacts the Indonesian migrant workers since their host countries suffer from the effect of infectious diseases. A big number of Indonesian migrant workers lost their jobs which caused them unable to send money to their families at home country. This paper aims to discuss the impacts of Covid-19 on Indonesian migrant workers' welfare and their families at home country. This paper is based on analysing existing statistical data and reviewing existing literature and research publications. The results show that the direct impacts of Covid-19 on Indonesian migrant workers are layoffs for both permanent and temporary workers. Indonesian migrant workers who have been laid off have to go back to their home country. Some Indonesian migrant workers who are still working in host countries received decreasing income due to salary reduction and no additional income for their extra working hours. Such condition brings about negative impacts on Indonesian migrant workers' welfare and their families at home country, mainly because of the reduce of remittances, reaching 10.28 percent during the Covid-19 pandemic. Considering the condition of migrant workers' families who have experienced a decrease in remittances, they should be eligible for receiving any safety net from social security programs due to Covid-19 pandemic impact.*

*Keywords: Indonesian migrant workers, Covid-19 pandemic, social security*

### Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok penduduk yang terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19 karena negara tempat mereka bekerja tidak luput dari penyakit infeksi menular tersebut. Dari sisi ekonomi, dampak yang dirasakan oleh sebagian PMI adalah kehilangan pekerjaan, karena Covid-19 memengaruhi aktivitas ekonomi berbagai negara tempat mereka bekerja. Akibatnya, mereka tidak mempunyai penghasilan yang bisa dikirim untuk keluarga yang ditinggalkan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dampak Covid-19 terhadap kesejahteraan PMI dan keluarga mereka di daerah asal. Analisis tulisan ini berdasarkan pada berbagai data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka terhadap literatur yang relevan. Hasil analisis memperlihatkan dampak langsung yang dirasakan PMI adalah diberhentikan dari pekerjaan atau tidak adanya perpanjangan kontrak kerja. PMI yang tidak dapat terus bekerja di luar negeri terpaksa harus kembali ke daerah asal. Sebagian PMI yang masih bekerja mengalami pengurangan pendapatan, antara lain karena pemotongan upah dan tidak ada penghasilan tambahan yang diperoleh saat bekerja lembur. Kondisi ini berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan PMI dan keluarganya karena aliran remitansi menjadi berkurang. Remitansi dari PMI ke Indonesia telah mengalami penurunan selama pandemi Covid-19, yaitu mencapai 10,28 persen. Mempertimbangkan kondisi keluarga PMI yang mengalami penurunan remitansi maka kelompok ini perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan jaminan sosial bagi penduduk yang terdampak Covid-19.

Kata kunci: pekerja migran Indonesia, pandemi Covid-19, jaminan sosial

### PENDAHULUAN

*Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona jenis SARS-CoV-2 telah mengguncang dunia sejak ditemukannya kasus pertama di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China pada Desember 2019. Penyakit yang disertai dengan gejala kehilangan penciuman dan rasa terhadap makanan (Spinato et al., 2020), demam, dan batuk (Menni et al., 2020) tersebut menyerang berbagai kelompok penduduk tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu kelompok yang tidak luput dari serangan Covid-19

adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di berbagai negara penempatan.

Selain berdampak pada kondisi kesehatan, virus corona menimbulkan dampak lain bagi PMI yang bekerja di negara-negara yang juga menghadapi pandemi Covid-19, salah satu di antaranya adalah dampak ekonomi (HRWG, 2020). Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya pendapatan karena mereka tidak diberi uang tambahan sebagai kompensasi untuk bekerja di hari libur merupakan dampak yang dirasakan PMI dari sisi ekonomi. Selanjutnya, mereka yang berstatus sebagai pekerja rumah tangga juga terpaksa bekerja lebih berat karena semua anggota keluarga

majikan berada di rumah sepanjang hari selama pemerintah negara tujuan memberlakukan kebijakan pelarangan berbagai kegiatan di luar rumah.

Salah satu pilihan yang dapat diambil oleh PMI yang mengalami PHK atau pengurangan penghasilan adalah kembali ke daerah asal. Namun, kebijakan negara tujuan yang menutup layanan transportasi umum menuju dan ke luar negara tersebut menyebabkan PMI tidak bisa pulang ke tanah air. Akibatnya, sebagian dari mereka mengalami kesulitan untuk mempertahankan hidup di negara tempat bekerja. Kondisi ini terutama terjadi di negara tetangga, yaitu Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Untuk membantu mereka, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengirimkan 3.000 paket bantuan bagi PMI yang terpaksa bertahan di Malaysia (World Bank, 2020a).

Di samping PMI yang tertahan di berbagai negara tujuan, sebagian lain berhasil pulang ke tanah air. Kepulangan PMI ke tanah air dapat menimbulkan berbagai persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh PMI dan keluarga mereka, akan tetapi juga oleh pemerintah di tingkat pusat serta daerah. Dari sisi PMI, PHK secara sepihak menyebabkan PMI kehilangan pendapatan ketika kontrak kerja mereka belum selesai. Bagi mereka yang telah mengeluarkan biaya untuk modal keberangkatan, PHK menyebabkan mereka tidak dapat mengembalikan modal finansial yang sudah diinvestasikan dan selanjutnya tidak memperoleh "keuntungan" (berupa gaji) dari investasi yang sudah dikeluarkan. Penghasilan selama bekerja di luar negeri yang dikirim sebagai remitansi ke daerah asal secara langsung terhenti begitu mereka mengalami PHK dan pulang ke daerah asal. Padahal, salah satu faktor yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja internasional adalah perbedaan gaji/upah antarwilayah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harris dan Todaro pada tahun 1970 dalam teori *neoclassical economy* (Gheasi & Nijkamp, 2017). Selanjutnya, keluarga-keluarga yang sangat menggantungkan kehidupan mereka pada gaji anggota keluarga yang menjadi PMI akan mengalami tekanan/kesulitan ekonomi. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan kesejahteraan keluarga PMI, antara lain terganggunya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak dan pelayanan kesehatan.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas dampak Covid-19 terhadap kesejahteraan PMI dan keluarga mereka di daerah asal. Dampak ekonomi berupa kehilangan pekerjaan baik karena PHK maupun penundaan/penghentian perpanjangan kontrak menjadi fokus dalam tulisan ini. Kehilangan pekerjaan menyebabkan hilangnya remitansi, yang pada gilirannya berpengaruh negatif terhadap kondisi ekonomi keluarga yang ditinggalkan di daerah asal. Sebelum membahas dampak ekonomi, dalam tulisan ini dikemukakan

gambaran singkat mengenai PMI di luar negeri selama pandemi Covid-19. Tulisan ini merupakan kajian pustaka terhadap berbagai bahan dan literatur mengenai PMI, pandemi Covid-19, dan dampaknya terhadap PMI beserta keluarga mereka. Analisis tulisan ini berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka. Data tersebut mencakup statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Bank Indonesia (BI), serta hasil-hasil penelitian terdahulu dan berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

## TINJAUAN TEORETIS DAN EMPIRIS PEKERJA MIGRAN

Migrasi tenaga kerja melintasi batas negara bukanlah fenomena baru di berbagai belahan dunia. Meskipun sudah terjadi sejak lama, migrasi internasional termasuk tenaga kerja, semakin meningkat selama beberapa dekade terakhir. Fenomena kependudukan ini pada umumnya dilakukan oleh mereka yang berasal dari negara-negara berkembang menuju negara-negara maju. Berbagai kesempatan kerja yang ditawarkan oleh negara-negara maju telah menarik tenaga kerja dari negara-negara berkembang untuk melakukan migrasi, sebagian besar di antaranya bersifat temporer. Kondisi seperti ini berlaku pula bagi sebagian tenaga kerja Indonesia. Melakukan migrasi ke luar negeri merupakan peluang bagi PMI untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi (Rantung et al., 2018; Aeni, 2019).

Seperti migrasi pada umumnya, migrasi tenaga kerja internasional disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut teori *neoclassical economy* yang dikemukakan oleh Harris dan Todaro pada tahun 1970, migrasi tenaga kerja internasional merupakan hasil dari proses pembangunan ekonomi yang tidak setara dan perbedaan gaji/upah antarwilayah (Gheasi & Nijkamp, 2017). Selanjutnya, teori *dual labor market* menyatakan bahwa migrasi tenaga kerja internasional terjadi karena adanya kebutuhan tenaga kerja di negara-negara maju (Wickramasinghe & Wimalaratana, 2016). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi arus migrasi tenaga kerja internasional dari negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang lebih lambat dan menyediakan gaji/upah lebih rendah menuju negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang lebih pesat dan memberikan gaji/upah yang lebih tinggi. Mengacu pada teori ini, daerah asal pekerja migran internasional memperoleh manfaat berupa berkurangnya rasio tenaga kerja terhadap modal serta remitansi yang dikirimkan oleh mereka yang meninggalkan daerah asal untuk bekerja di luar negeri. Dalam konteks yang lebih luas, remitansi dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan daerah asal.

Upah yang diperoleh selama bekerja di negara lain, yang pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan upah untuk pekerjaan yang sama di dalam negeri, kemudian dikirim ke negara asal yang dikenal dengan remitansi. Remitansi, ini dimanfaatkan oleh anggota keluarga yang ditinggalkan di daerah asal untuk berbagai kepentingan. Penggunaan remitansi, antara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari dan investasi, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan serta benda lainnya seperti rumah dan lahan pertanian (Cabegin & Alba, 2014; Thapa & Acharya, 2017). Berbagai studi mendukung argumen tersebut. *Mustapita & Rizal (2017)* dalam studi mereka di Kabupaten Malang menemukan bahwa remitansi digunakan oleh keluarga PMI di daerah asal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli barang-barang elektronik, memperbaiki rumah, membayar hutang, dan untuk penggunaan produktif, termasuk membiayai pendidikan anak serta membeli lahan pertanian dan ternak. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan perbaikan rumah merupakan dua penggunaan remitansi terbanyak. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa remitansi memiliki dampak yang signifikan terhadap konsumsi dan pengeluaran makanan daripada untuk investasi atau untuk membuka usaha (Hamidah, 2013; Nahar & Arshad, 2017; Dewandaru et al., 2019; Ukhtiyani & Indartono, 2020; Misdawati & Siregar, 2020; Pratikto et al., 2020). Pola yang sama juga ditemukan di negara lain. Dalam studi mereka di Nigeria, *Fonta et al. (2015)* menemukan bahwa tiga pemanfaatan terbesar dari remitansi yang dikirim oleh pekerja migran di daerah asal adalah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, membangun/memperbaiki rumah, dan membiayai pendidikan/membayar uang sekolah. Pemanfaatan remitansi yang sama juga ditemukan pada keluarga migran di Maroko (*Kusunose & Rignall, 2018*). Selanjutnya, remitansi juga digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan serta membangun usaha kecil dan investasi seperti membeli lahan. *Maharja et al. (2012)* menemukan bahwa di Nepal, remitansi telah meningkatkan pendapatan keluarga dalam jumlah besar.

Berdasarkan temuan studi tersebut, dapat dikatakan bahwa remitansi berperan penting terhadap kesejahteraan pekerja migran dan keluarga mereka di daerah asal. Remitansi yang diperoleh mendukung keluarga PMI di daerah asal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pola penggunaan remitansi yang utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari merefleksikan bahwa kebutuhan primer (konsumsi) keluarga terpenuhi dari remitansi yang diterima, di samping kebutuhan-kebutuhan lain seperti pendidikan dan pembangunan/perbaikan rumah tempat tinggal.

Selama masa pandemi Covid-19 yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk

kondisi ekonomi negara tempat bekerja, remitansi yang diperoleh keluarga PMI juga mengalami penurunan. Sebagian keluarga PMI bahkan tidak bisa memperoleh remitansi karena anggota keluarga mereka yang bekerja di luar negeri kehilangan penghasilan atau memperoleh penghasilan yang sangat minim sehingga tidak bisa dikirimkan kepada keluarga di daerah asal. Dalam kondisi demikian, tidak dapat dihindarkan lagi terjadi penurunan kesejahteraan keluarga PMI, antara lain terganggunya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak, dan kesulitan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagaimana layaknya penduduk yang mengalami gangguan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19, keluarga PMI juga menjadi sasaran penerima bantuan sosial, khususnya dari pemerintah agar mereka dapat mempertahankan kehidupan selama masa sulit tersebut.

#### **PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DI MASA PANDEMI COVID-19**

Indonesia telah menempatkan pekerja migran di luar negeri sejak lama. Jumlah mereka yang ditempatkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan negara penempatan yang semakin meluas (*Bachtiar, 2011*). Pada tahun 2020, ketika Covid-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi dan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia sejak 20 Maret 2020, sampai kebijakan itu dicabut pada tanggal 30 Juli 2020, tetap ada penempatan PMI ke luar negeri. Namun demikian, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada masa sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Sebagai contoh, pada bulan April 2020, jumlah PMI yang ditempatkan ke berbagai negara adalah 2.347 orang (BP2MI, 2020). Jumlah tersebut hanya sekitar 10 persen dari penempatan pada bulan yang sama tahun 2019 (25.489 orang) dan 2018 (23.431 orang). Sebagian besar PMI yang ditempatkan ke luar negeri adalah mereka yang termasuk kategori *re-entry*, yaitu PMI yang memperpanjang kontrak kerja di negara penempatan tanpa harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Selama kurun waktu 2017-2019, lima negara yang dominan berdasarkan urutan jumlah PMI terbanyak adalah Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Saudi Arabia (BNP2TKI, 2019). Namun, sebulan setelah Covid-19 ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization (WHO)*) sebagai pandemi (April 2020), tidak ada penempatan PMI ke Malaysia, Singapura, dan Saudi Arabia (BP2MI, 2020). Ketiga negara tersebut termasuk dalam 156 negara yang menutup pintu bagi pendatang, termasuk tenaga kerja asing, karena peningkatan kasus Covid-19. Singapura

bahkan menjadi negara di Asia Tenggara yang mencatat kasus Covid-19 tertinggi, kemungkinan karena pelacakan (*tracing*) dan pengujian (*testing*) yang baik (Olivia et al., 2020). Sebaliknya, penempatan PMI masih dilakukan ke Taiwan dan Hongkong karena keduanya masih menerima tenaga kerja asing. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diberlakukan sejak 20 Maret 2020, yang menyebutkan bahwa penempatan PMI ke luar negeri masih dilakukan sepanjang negara tujuan tidak menutup pintu bagi pekerja migran dari luar negeri.

Seperti masa sebelum pandemi Covid-19, kebanyakan PMI yang ditempatkan pada masa pandemi penyakit menular tersebut melakukan jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam kategori *low skilled* dan *middle skilled*. Secara khusus, mayoritas mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga (*domestic worker*) dan penjaga orang tua/orang sakit (*caregiver*) (BP2MI, 2020). Jenis pekerjaan mayoritas PMI dan tempat tinggal mereka selama bekerja di luar negeri, misalnya di rumah pemberi kerja bagi pekerja rumah tangga, *caregiver* serta *babysitter* (Hidayat, 2017; Susilo, 2016), dan di hunian-hunian yang berlokasi di perkebunan (Wan Hassan et al., 2016), menyebabkan PMI rentan tertular Covid-19. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pemerintah Indonesia sangat hati-hati dan selektif dalam menempatkan PMI pada masa pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, beberapa hal yang terkait dengan pengiriman PMI adalah sebagai berikut, yaitu (1) ketersediaan kesempatan kerja di luar negeri berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja Indonesia. Di tengah kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri, sebagian tenaga kerja Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia di berbagai negara, meskipun masih didominasi oleh mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan kategori *low* dan *middle skills*; (2) pada masa pandemi Covid-19 sekalipun masih ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, namun jumlahnya jauh berkurang dibanding masa-masa sebelum munculnya penyakit infeksi menular tersebut; (3) berkurangnya jumlah PMI yang bekerja di luar negeri, antara lain karena pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara penerima terhadap kehadiran tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, yang dikhawatirkan dapat memperparah penularan dan penyebaran Covid-19; dan (4) Pemerintah Indonesia juga melakukan pemilihan yang ketat bagi negara tempat PMI bekerja, yaitu negara dengan risiko rendah penularan Covid-19 untuk melindungi PMI dari penularan penyakit infeksi tersebut.

## PANDEMI COVID-19: PENYEBAB HILANGNYA PEKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Sejak WHO menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, kegiatan ekonomi di seluruh dunia terganggu. Kebijakan *lockdown*, pembatasan perjalanan, dan anjuran untuk menjaga jarak sosial (*social distancing*) yang diterapkan oleh sebagian besar negara di dunia untuk menghambat transmisi virus yang menular dari manusia ke manusia telah membuat sebagian kegiatan ekonomi global terhenti. Banyak aktivitas ekonomi ditutup dan hanya sedikit orang yang bisa bekerja karena penerapan kebijakan *lockdown* dan *social distancing* di berbagai negara.

Kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang menyebabkan kesulitan ekonomi merupakan salah satu dampak yang dirasakan pekerja migran di berbagai negara akibat kebijakan tersebut (Ullah et al., 2021; Neef, 2020; Posel et al., 2021; Shimizutani & Yamada, 2021; Nakamura & Suzuki, 2021). *International Labour Office* (ILO) (2020a) mencatat bahwa secara umum lapangan pekerjaan yang menjadi mata pencaharian para pekerja migran adalah sektor-sektor yang paling parah terkena dampak Covid-19 sehingga mereka yang pertama kali kehilangan pekerjaan dan menghadapi hambatan untuk masuk kembali ke pasar kerja. Secara global diperkirakan ada 164 juta pekerja migran, hampir setengahnya adalah perempuan, dan puluhan juta orang kembali ke negara asalnya karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 (ILO, 2020b).

Banyak pekerja migran menjadi menganggur, terutama karena mereka merupakan kelompok rentan, bahkan sebelum terjadi pandemi. Pada umumnya pekerja migran internasional bekerja pada sektor informal yang kurang terlindungi, yaitu bekerja pada pekerjaan-pekerjaan dengan kontrak kerja nonstandar dan di bawah pengaturan informal, serta tidak memiliki perlindungan sosial jika kehilangan pekerjaan atau sakit (Fasani & Mazza, 2020; Marschke et al., 2021). Menurut Chowdhury & Chakraborty (2021), pekerja migran dan pekerja sektor informal merupakan kelompok yang paling berisiko kehilangan pekerjaan ketika mereka tidak mempunyai kontrak kerja yang sesuai dengan ketentuan dan juga memiliki posisi tawar yang rendah.

Kehilangan pekerjaan bagi pekerja migran menimbulkan persoalan di negara tempat bekerja, karena sebagian besar dari mereka mengalami hambatan untuk kembali ke negara asal, terutama karena tidak mendapat biaya untuk perjalanan pulang dari majikan maupun perusahaan tempat mereka bekerja. Di negara-negara Teluk (Timur Tengah) misalnya, pemerintah telah gagal memaksa perusahaan dan majikan untuk memenuhi gaji dan kewajiban untuk memberikan biaya perjalanan

keputusan pemerintah yang telah mereka berhentikan ke negara asal mereka (Mohamedi, 2020). Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa beberapa negara Teluk telah meminta negara asal untuk memulangkan pekerja migran, baik mereka yang kehilangan pekerjaan maupun yang terdampak (yaitu mereka yang tinggal melebihi batas akhir izin visa dan telah mendapat pengampunan).

PMI juga mengalami dampak ekonomi dari Covid-19, yaitu kehilangan pekerjaan dan terhambat untuk pulang ke Indonesia, karena ada kebijakan *lockdown* dan larangan perjalanan di negara-negara tempat bekerja. Sebagian besar PMI yang telah selesai masa kontraknya dan tidak bisa lagi memperpanjangnya harus pulang ke Indonesia. Namun, mereka tidak bisa pulang karena terhambat oleh kebijakan pembatasan perjalanan (*travel ban*). Mereka yang belum selesai masa kontraknya masih dapat bekerja dan mendapat gaji bulanan tetapi ada pengurangan upah yang diterima. Data empiris ditunjukkan oleh hasil penelitian *Human Rights Working Group* (HRWG), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Jaringan Buruh Migran (JBM) terhadap 149 responden PMI yang bekerja di sembilan negara tujuan, antara lain Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan. Dengan menggunakan SurveyMonkey pada 21-30 April 2020 tentang "Dampak Covid-19 terhadap Pekerja Migran Indonesia terkait dengan Keamanan, Kesehatan, dan Ekonomi", ditemukan 95 persen PMI yang bekerja dan masih menerima gaji bulanan, tetapi tidak mendapatkan upah lembur, padahal beban kerja berganda dan adanya pembatasan mobilitas menyebabkan mereka tidak bisa mengirim uang ke keluarga (HRWG, 2020). Sumber data yang sama menyebutkan PMI yang tidak mendapat gaji adalah mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik dan konstruksi di Malaysia dan Saudi Arabia. Sebanyak 54 persen PMI di Saudi Arabia yang bekerja di dua sektor tersebut tidak mendapatkan gaji. Kondisi pekerja migran internasional seperti ini juga dialami oleh mereka yang berasal dari negara lain. Ribuan pekerja migran asal Nepal misalnya, telah kehilangan pekerjaan penuh waktu atau di-PHK, atau gaji mereka telah dipotong (Mandal, 2020 dalam Bhattarai & Baniya, 2020).

PMI yang kehilangan pekerjaan di negara tujuan terpaksa pulang ke daerah asal karena kesulitan untuk mempertahankan kehidupan. Kembalinya mereka menambah persoalan pengangguran di Indonesia. Dengan mengacu pada data yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Indayani & Hartono (2020) mengemukakan bahwa sebanyak 212.394 pekerja sektor formal mengalami PHK, di samping 1.201.191 orang pekerja lainnya terpaksa dirumahkan sebagai dampak dari Covid-19. Selanjutnya, data dari Badan Pelaksana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) memperlihatkan sekitar 454.000 dan 537.000 pekerja sektor formal dan nonformal secara

berurutan mengalami PHK. Dalam situasi seperti ini maka PMI yang pulang akan kesulitan mendapatkan pekerjaan, terutama karena sektor ekonomi dalam negeri menghadapi dampak buruk pandemi Covid-19. Selama beberapa bulan mereka tidak bisa berangkat untuk bekerja ke luar negeri karena kebijakan moratorium pengiriman PMI yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diberlakukan sejak 18 Maret 2020. Kebijakan ini telah dicabut pada tanggal 30 Juli 2020, tetapi memerlukan waktu beberapa lama untuk penempatan PMI, karena pemerintah harus yakin bahwa hak pekerja dipenuhi sesuai peraturan di samping juga negara tujuan telah aman dari Covid-19.

Penghentian sementara penempatan pekerja migran ini berlaku bagi PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, PMI perseorangan, serta awak kapal niaga/perikanan pada kapal berbendera asing. Moratorium ini terutama ditujukan untuk melindungi PMI dari ancaman terpapar Covid-19. Oleh karena itu, dalam moratorium disebutkan bahwa PMI yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan jika negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja. Demikian pula PMI yang telah bekerja di negara tujuan penempatan dapat tetap bekerja sampai dengan perjanjian kerja berakhir atau memperpanjang perjanjian kerja yang sudah berakhir sesuai kesepakatan antara PMI dengan pemberi kerja. Perpanjangan perjanjian kerja dilakukan dengan mempertimbangkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah negara tujuan penempatan. Dengan demikian, moratorium hanya berlaku untuk PMI yang telah kembali ke Indonesia dan belum memiliki visa kerja. Pasca dicabutnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020, akan dilakukan lagi penempatan secara bertahap di 14 negara yang telah membuka kesempatan kerja untuk PMI, tentunya dengan memperhatikan hak-hak PMI dan protokol kesehatan. Penghentian sementara penempatan PMI ini memperburuk kondisi keluarga PMI, karena mereka tidak lagi dapat menerima remitansi yang merupakan sumber pendapatan utama rumah tangga PMI.

Berdasarkan bahasan tentang kehilangan pekerjaan pada PMI akibat Covid-19 di atas, secara ringkas dapat dikemukakan empat aspek, yaitu (1) PMI kehilangan pekerjaan disebabkan oleh selesainya masa kontrak kerja yang tidak dapat diperpanjang lagi serta terputusnya kontrak kerja; (2) PMI yang belum selesai masa kontrak dan bisa bertahan untuk bekerja, tetapi mengalami pengurangan jam kerja yang berdampak pada turunnya

pendapatan; (3) akibat kehilangan pekerjaan, PMI pulang ke Indonesia dalam jumlah yang besar sehingga menambah persoalan pengangguran dan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi keluarga PMI; dan (4) kehilangan pekerjaan bagi PMI berdampak pada menurunnya aliran remitansi di tingkat negara, dan dampak pada sebagian keluarga PMI dapat pada kondisi yang lebih buruk lagi, yaitu terhentinya remitansi.

### **PANDEMI COVID-19 DAN REMITANSI SERTA DAMPAK TERHADAP KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Ekonomi di banyak negara asal pekerja migran ditopang oleh uang/remitansi yang dikirim pekerja migran. Remitansi, biasanya dipahami sebagai kiriman uang atau barang dari migran ke keluarga dan teman di negara asal. Pengiriman uang memberikan manfaat yang besar bagi keluarga, masyarakat, dan negara asal. Pada tingkat makro, remitansi menjadi salah satu sumber dana luar negeri yang penting bagi pembangunan ekonomi (Acharya & Leon-Gonzales, 2013; Masron & Subramaniam, 2018; Gordon, et al., 2018; Akpa et al., 2020), baik dilihat dari sumbangannya terhadap pendapatan nasional bruto (Afriska et al., 2018) maupun dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang berbeda-beda (Liton et al., 2017; Zmarai et al., 2020). Lebih lanjut, remitansi juga berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di negara-negara asal pekerja migran (Siddique et al., 2016; Nahar & Arshad, 2017; Maarif, 2018; Misdawati & Siregar, 2020; Fahrizal et al., 2021). Azizi (2021) dalam analisisnya terhadap data 103 negara berkembang selama kurun waktu tahun 1990-2014 mendapatkan bahwa peningkatan 10 persen remitansi per kapita menyebabkan terjadinya penurunan *poverty headcount* (angka kemiskinan) sebesar 1 persen, penurunan *poverty gap* (kedalaman kemiskinan) sebesar 1,8 persen, dan penurunan *poverty severity* (keparahan kemiskinan) sebesar 2,5 persen di negara-negara yang dianalisis.

Pada tingkat mikro, remitansi memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian keluarga pekerja migran di daerah asal. Remitansi merupakan sumber keuangan yang sangat penting bagi sebagian besar keluarga pekerja migran. Banyak studi yang telah dilakukan sebelumnya mendapatkan bahwa remitansi yang dikirim berperan penting untuk pemenuhan berbagai kebutuhan sehari-hari semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, remitansi tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, akan tetapi juga untuk biaya pendidikan dan kesehatan, serta investasi untuk kegiatan produktif (McKenzie & Menjivar, 2011; Romdiati, 2012; Hamidah, 2013; Imai et al., 2014; Arifuzzaman et al., 2015; Fonta et al., 2015; Cuecuecha & Adams (2016); Mustapita & Rizal,

2017; Simionescu & Dumitrescu, 2017; Dewandaru et al., 2019; Noveria, 2017; Suyanto, 2018; Mas'udah, 2019; Ukhtiyani & Indartono, 2020; Alahmad et al., 2020). Remitansi juga digunakan sebagai asuransi ketika keluarga pekerja migran mengalami semacam guncangan ekonomi (Uddin, 2016).

Namun, pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung telah merubah kenyataan tersebut. Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap remitansi. Covid-19 telah menyebabkan banyak pekerja migran mengalami penurunan pendapatan dan bahkan ada pula yang kehilangan pekerjaan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Pekerja migran yang mengalami penurunan pendapatan dan masih bertahan di negara tujuan mengirimkan remitansi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibanding masa sebelum pandemi Covid-19. Covid-19 juga telah memaksa sebagian besar pekerja migran kembali ke negara asal, baik secara sukarela maupun terpaksa. Akibatnya, keluarga mereka tidak lagi memperoleh remitansi, selain memperburuk pengangguran di negara asal, seperti telah dikemukakan sebelumnya.

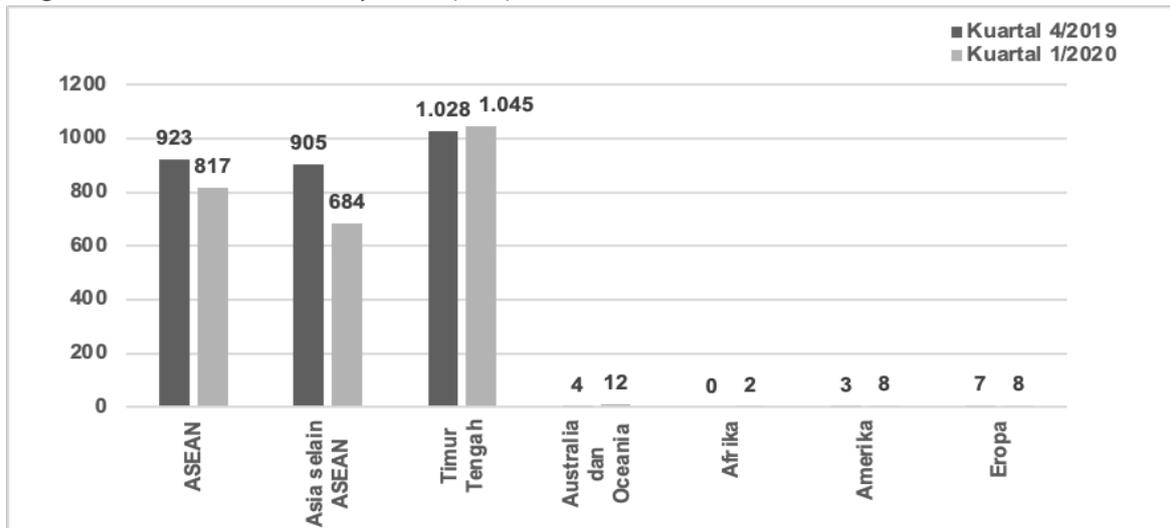
Ketika pandemi Covid-19 mulai melanda secara global pada akhir Februari 2020, aktivitas ekonomi global hampir terhenti. Jutaan pekerja migran kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka berkurang, terdampar, dan pergi dengan sedikit atau tanpa dukungan dari negara tujuan mereka (Asare et al., 2020). PMI yang bekerja di industri perikanan seperti di Taiwan tertahan di pelabuhan akibat kebijakan *lockdown* yang diberlakukan oleh negara lokasi pelabuhan tempat kapal mereka bersandar (Marschke et al., 2021). Lebih lanjut dikemukakan, terjadinya penutupan bank dan operator jasa keuangan di negara asal dan negara tujuan menyebabkan pekerja migran dan keluarga mereka tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, untuk mengirim dan menerima remitansi.

Secara global pada tahun 2019, para pekerja migran diperkirakan telah mengirim USD554 miliar kepada keluarga di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Ratha et al., 2020). Namun, ketika terjadi pandemi, remitansi menurun karena pekerja migran semakin sulit untuk mengirim remitansi. Penurunan remitansi telah terjadi pada kuartal pertama tahun 2020 dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2020 (World Bank, 2020b). Data remitansi global diproyeksikan turun sekitar 20 persen hingga akhir tahun 2020, sedangkan remitansi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah diproyeksikan turun sekitar 19,7 persen, yaitu menjadi USD445 miliar (World Bank, 2020b). Sumber yang sama menyebutkan, penurunan remitansi terjadi di semua wilayah Bank Dunia, yaitu di Eropa dan Asia Tengah (27,5 persen), diikuti oleh Afrika Sub-Sahara (23,1 persen), Asia Selatan (22,1 persen), Timur Tengah dan Afrika Utara (19,6 persen),

Amerika Latin dan Karibia (19,3 persen), serta Asia Timur dan Pasifik (13 persen). Indonesia yang termasuk dalam wilayah Asia Timur dan Pasifik menurut klasifikasi Bank Dunia juga mengalami penurunan remitansi. Pada Oktober 2020, jumlah remitansi yang masuk ke Indonesia sebesar USD9,835 juta, lebih rendah daripada remitansi tahun 2019, yaitu sebanyak USD11,666 juta (World Bank, 2020b).

Dengan menggunakan *data set* remitansi di rumah tangga sebelum terjadi pandemi dan proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 hasil perhitungan *International Monetary Fund* (IMF) dan

USD903 juta menjadi USD910 juta), Uni Emirat Arab (USD56 juta menjadi USD58 juta), Qatar (USD50 juta menjadi USD52 juta), Kuwait (USD13 juta menjadi USD14 juta), dan negara-negara di Timur Tengah lainnya dengan nilai USD3 juta atau kurang. Kenaikan remitansi dari pekerja migran di kawasan Timur Tengah nampaknya terjadi sebelum kawasan tersebut menerapkan kebijakan *lockdown* yang dimulai pada Mei, misalnya di Saudi Arabia tanggal 23 Mei 2020.<sup>1</sup> Kondisi ini memungkinkan PMI masih dapat mengirim uang pada keluarga mereka.



Sumber: Bank Indonesia, 2020.

**Gambar 1.** Nilai Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Menurut Wilayah/Benua Tahun 2020 (juta USD)

Bank Dunia, Murakami et al. (2020) mengevaluasi potensi dampak wabah Covid-19 terhadap remitansi di Filipina, yang menunjukkan adanya penurunan antara 14-20 persen per tahun. Penurunan persentase remitansi yang sama juga diproyeksikan terjadi di antara pekerja migran asal Amerika Tengah dan Karibia yang bekerja di Amerika Serikat pada masa pandemi Covid-19 (Caruso et al., 2021). Demikian pula di Bangladesh, berdasarkan data Biro Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, dan Pelatihan, remitansi ke negara tersebut turun dari USD18,92 miliar pada tahun 2018-2019 menjadi USD18,2 miliar (Karim et al., 2020).

Menurut data Bank Indonesia (2020), remitansi dari tenaga kerja Indonesia mengalami penurunan sekitar 10,28 persen pada masa pandemi Covid-19. Pada kuartal 4 tahun 2019 jumlah remitansi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di berbagai negara di dunia mencapai USD2.870 juta, turun menjadi USD2.575 juta pada kuartal pertama tahun 2020. Penurunan remitansi terjadi dari wilayah ASEAN dan Asia lainnya, sedangkan remitansi dari negara-negara di Timur Tengah, mengalami sedikit peningkatan (Gambar 1). Kenaikan remitansi dari wilayah Timur Tengah tersebut berasal dari Saudi Arabia (dari

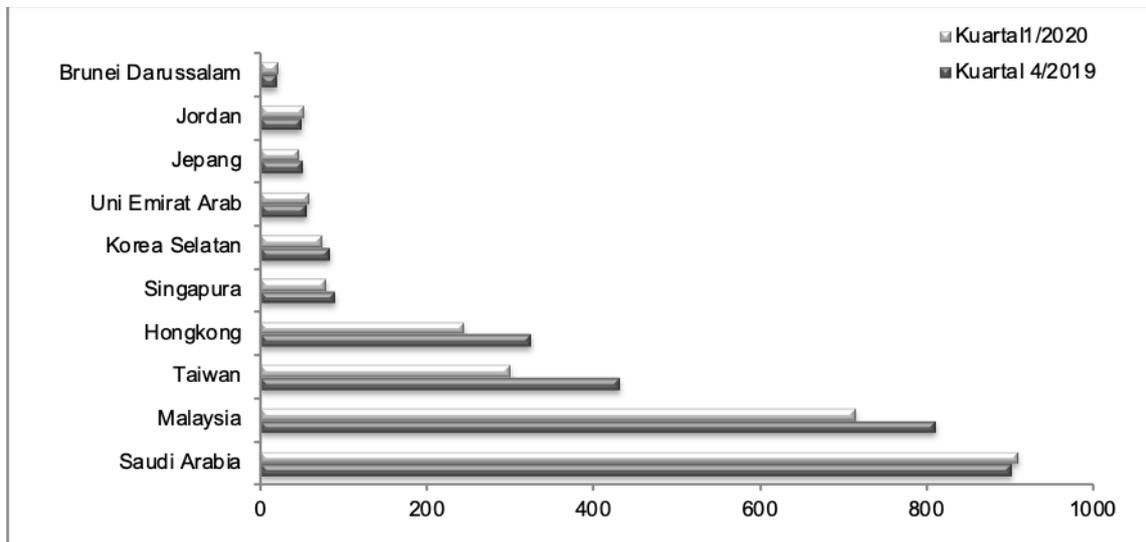
Aliran remitansi ke Indonesia berasal dari berbagai negara tempat PMI bekerja. Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, dan Hongkong adalah negara-negara asal remitansi masuk ke Indonesia. Ini sesuai dengan jumlah PMI yang cukup besar di negara-negara tersebut, yaitu 865 ribu orang, 1,686 juta orang, 236 ribu orang, dan 192 ribu orang secara berturut-turut pada akhir tahun 2019 (Bank Indonesia, 2020). Meskipun jumlah PMI di Malaysia paling banyak, tetapi jumlah remitansi sedikit lebih rendah daripada remitansi dari Saudi Arabia (Gambar 2). Saluran remitansi informal nampaknya memengaruhi jumlah remitansi ini. Data yang tercatat pada statistik Bank Indonesia adalah data pengiriman uang melalui jalur formal, sementara ada saluran pengiriman uang melalui jalur informal (misalnya dikirim melalui teman atau kerabat dan jalur informal lainnya) yang mungkin jumlahnya juga cukup besar. Kedekatan jarak geografis antara Indonesia dan Malaysia yang juga merupakan negara berbatasan langsung, memungkinkan remitansi melalui jalur informal cukup besar. Ini mengurangi jumlah remitansi yang

<sup>1</sup> Diperoleh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200522151934-4-160302/resmi-arab-saudi-terapkan-lockdown-saat-lebaran>, diakses 19 Juli 2020.

tercatat pada jalur formal, dalam konteks data ini bersumber dari Bank Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada menurunnya remitansi PMI dari berbagai negara. Remitansi PMI dari Malaysia misalnya, pada kuartal 4 tahun 2019 sebesar USD812 juta (Bank Indonesia,

akses pengiriman uang karena kehilangan pekerjaan atau hambatan akibat kebijakan *social distancing* menyebabkan turunnya nilai remitansi yang cukup besar dari PMI di dua negara tersebut. Penurunan remitansi PMI juga terjadi dari negara-negara Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.



Sumber: Bank Indonesia, 2020.

**Gambar 2.** Nilai Remitansi dari 10 Negara Penempatan PMI Terbesar Tahun 2020 (juta USD)

2020), merupakan angka terbesar kedua setelah Saudi Arabia (Gambar 2). Pada kuartal pertama tahun 2020, jumlah remitansi turun menjadi USD715 juta atau 11,95 persen. Penurunan ini karena tidak adanya pendapatan PMI akibat kehilangan pekerjaan. Faktor lain adalah implementasi kebijakan *lockdown* atau *Movement Control Order* (MCO) yang menghambat PMI untuk mengirim uang kepada keluarganya, karena harus tetap tinggal di rumah/*base-camp*/jenis tempat tinggal lainnya. Di sisi lain, penyedia layanan remitansi juga harus menutup atau mengurangi jam dan tenaga layanan (United Nations, 2020). *Lockdown* dan *social distancing* menyebabkan mobilitas dan transportasi umum juga terbatas sehingga mempersulit orang untuk mencapai cabang dan agen penyedia layanan remitansi (KNOMAD, 2020). Selain itu, banyak pekerja migran memiliki keterbatasan saluran digital untuk dimanfaatkan dalam pengiriman uang sehingga mereka harus mendatangi lokasi-lokasi penyedia layanan pengiriman uang. Penurunan nilai remitansi dari PMI di Taiwan dan Hongkong pada angka tertinggi pertama dan kedua, yaitu 30,32 persen (dari USD432 juta menjadi USD301 juta) dan 24,92 persen (dari USD325 juta menjadi USD244 juta) secara berurutan (Gambar 2). Lebih tingginya gaji PMI di kedua negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin menjadi penyebabnya. Diasumsikan gaji tinggi tersebut diikuti dengan jumlah pengiriman uang yang besar pula. Oleh karena itu, terhentinya

Remitansi berperan positif terhadap kesejahteraan keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di daerah asal, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Wadood & Hossain (2017) dalam studi mereka di Bangladesh menemukan bahwa remitansi meningkatkan pendapatan per kapita dan sebaliknya, menurunkan status kemiskinan keluarga pekerja migran. Berkurangnya remitansi berpotensi menurunkan kesejahteraan keluarga pekerja migran, antara lain karena berkurangnya pendapatan yang biasanya digunakan untuk pemenuhan konsumsi keluarga. Hasil analisis data di Filipina, misalnya, menunjukkan bahwa penurunan remitansi telah menyebabkan menurunnya pengeluaran makanan per kapita sebesar 2-3 persen dalam satu tahun pandemi (Murakami et al., 2020). Analisis regresi multinomial data *Global World Poll* (GWP) untuk individu di *Global South* menunjukkan bahwa tidak adanya aliran remitansi meningkatkan kemungkinan kerawanan pangan (Ebadi et al., 2018). Covid-19 juga berpotensi menyebabkan penurunan standar hidup keluarga pekerja migran, berkurangnya tabungan dan investasi, serta penurunan pengeluaran untuk makanan, pendidikan, dan kesehatan (Karim et al., 2020).

Sebagian besar remitansi digunakan oleh keluarga PMI untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga pengurangan dan bahkan terhentinya remitansi dapat mengakibatkan kerentanan ekonomi dan sosial. Kondisi ini dapat saja berlangsung lama, tergantung pada pulihnya kegiatan ekonomi negara-negara tempat PMI bekerja dari Covid-19 sehingga PMI bisa

kembali bekerja ke luar negeri sebagai sumber mata pencaharian bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dampak ekonomi yang muncul akibat Covid-19 tidak hanya dalam lingkup ekonomi makro, dalam arti perekonomian global, melainkan juga terhadap perekonomian nasional negara-negara asal pekerja migran, komunitas, dan keluarga pekerja migran (Abel & Gietel-Basten, 2020).

Mengingat besarnya dampak pandemi Covid-19 di tingkat mikro, para akademisi dari berbagai negara asal pekerja migran telah menawarkan rekomendasi untuk program pemerintah dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi pekerja migran dan keluarganya. Karim et al. (2020) menyatakan bahwa pemerintah Bangladesh seharusnya memberikan bantuan sosial bagi kelompok penduduk tersebut beserta keluarga mereka yang selama ini menggantungkan kehidupan dari remitansi. Selanjutnya, Bhagat et al. (2020) tidak hanya mengajukan rekomendasi jangka pendek, akan tetapi juga jangka panjang kepada pemerintah India untuk membantu mereka yang terdampak secara ekonomi. Program jangka panjang perlu dipertimbangkan mengingat akhir pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah negara tersebut antara lain penguatan sistem kesehatan masyarakat, penyediaan dukungan bagi pekerja migran yang pulang dan mengintegrasikan mereka kembali, serta memperkuat basis data mengenai migrasi dan keluarga pekerja migran.

Dari bahasan mengenai dampak ekonomi pandemi Covid-19 terhadap penurunan dan bahkan terhentinya remitansi pada sebagian keluarga PMI tersebut di atas, secara garis besar dapat dikemukakan hal-hal penting, yaitu (1) penurunan remitansi dari PMI pada level makro (nasional) terjadi sejak awal pandemi, kemungkinan karena sebagian PMI telah pulang sejak awal pandemi. Sementara bagi mereka yang masih bertahan bekerja di negara-negara tujuan memiliki akses terbatas untuk pergi ke kantor layanan pengiriman uang sebagai dampak kebijakan *lockdown*, selain juga ada pengurangan jam kerja di kantor layanan tersebut; (2) pada level mikro (keluarga) bukan hanya terjadi penurunan remitansi, tetapi bahkan tidak menerima remitansi lagi pada kebanyakan keluarga PMI, sebagai dampak dari selesai atau putusnya kontrak kerja dan harus pulang kembali ke Indonesia; dan (3) penurunan/terhentinya aliran remitansi menyebabkan keluarga PMI kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, terutama pada keluarga yang sumber pendapatannya bergantung pada remitansi.

## KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara utama pengirim pekerja migran internasional ke berbagai negara,

terutama ke Malaysia, negara-negara Timur Tengah, dan Asia Timur (Hongkong, Korea Selatan, dan Taiwan). Sebagian besar PMI merupakan kelompok rentan, bahkan sebelum terjadi pandemi Covid-19. Demikian pula keluarga mereka yang sumber kehidupannya sangat bergantung pada kiriman uang PMI, mereka semakin rentan di masa pandemi Covid-19. Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, tidak diragukan lagi PMI dan keluarganya merasakan dampak negatifnya. Kehidupan PMI dan keluarganya sangat bergantung pada upah/gaji yang diterima dari pekerjaan-pekerjaan yang paling terkena imbas kebijakan *lockdown* dan *social distancing*, seperti pekerjaan-pekerjaan di sektor domestik (penata laksana rumah tangga dan perawatan orang tua), sektor perkebunan, dan konstruksi sebagai buruh harian lepas. Pekerjaan di sektor-sektor ini menganut sistem kontrak kerja nonstandar dan berada di bawah pengaturan informal. Kehilangan pekerjaan bagi PMI diakibatkan oleh pemutusan kontrak kerja atau kontrak kerja telah selesai yang tidak dapat diperpanjang lagi karena pandemi Covid-19. Tanpa pekerjaan di negara tujuan menyebabkan mereka harus kembali pulang ke Indonesia. Sebagian besar PMI dipulangkan oleh pemerintah Indonesia, dan sebagian kecil pulang secara sukarela dengan biaya sendiri. Selama tahun 2020, hampir 200 ribu PMI kembali ke tanah air.

Kepulangan PMI ke tanah air membawa dampak negatif terhadap negara (memperburuk situasi pengangguran) dan keluarga (menurunnya/hilangnya sumber pendapatan keluarga dari remitansi). Meskipun tidak berkontribusi besar dalam menambah pengangguran terbuka di Indonesia, tetapi sebagian PMI akan menjadi penganggur dalam beberapa waktu, bahkan mungkin hingga mereka dapat bekerja kembali ke luar negeri. Meskipun sudah ada pengiriman kembali PMI untuk bekerja ke luar negeri, tetapi pengiriman masih dalam jumlah terbatas, terutama karena sebagian besar negara-negara tujuan tempat PMI bekerja masih belum menerima kedatangan pekerja migran.

PMI yang menganggur berdampak negatif terhadap keluarga mereka, terutama yang kehidupannya bergantung pada remitansi. Penurunan remitansi telah terjadi sejak triwulan pertama tahun 2020, yaitu sejak mulai terjadi wabah Covid-19. Bank Indonesia (2020) mencatat di masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan remitansi sekitar 10,28 persen. Pada level keluarga, penurunan dan bahkan hilangnya aliran remitansi menyebabkan keluarga PMI sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Remitansi pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan konsumtif lainnya, sangat sedikit keluarga PMI yang memanfaatkan untuk investasi (kecuali pendidikan anak) dan usaha produktif.

PMI memiliki jaring pengaman yang terbatas karena bekerja pada pekerjaan informal dan tidak dijamin oleh jaminan sosial di negara tempat bekerja. Demikian pula setibanya di Indonesia, PMI yang pulang di masa pandemi Covid-19 ini sering dinilai sebagai kluster baru penularan Covid-19 di Indonesia. Meskipun protokol kesehatan diterapkan pada PMI dengan ketat, tidak menutup kemungkinan setibanya di daerah asal mereka mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan pemerintah desa. Padahal PMI yang baru saja kehilangan pekerjaan mungkin tidak membawa uang hasil kerjanya karena sudah dipakai untuk konsumsi selama menunggu kepulangan. Karenanya, turunnya atau terhentinya aliran remitansi dapat berdampak buruk pada penurunan kondisi ekonomi, bahkan lebih buruk lagi jatuh pada kemiskinan.

Pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap PMI beserta keluarganya semakin menegaskan bahwa kerentanan PMI terjadi karena posisi mereka sebagai pekerja sektor informal tanpa perlindungan sosial, baik di negara tempat kerja maupun oleh pemerintah Indonesia. Kerentanan ini semakin tinggi ketika mereka kembali ke daerah asal dengan status sebagai penganggur, terbatas/tidak memiliki akses terhadap layanan publik, dan bahkan menjadi sasaran stigma sebagai orang yang dapat menularkan Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, PMI perlu mendapat bantuan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, selain upaya pemberdayaan ekonomi untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Beberapa upaya yang penting dilakukan adalah:

1. Pemberian akses terhadap jaring pengaman sosial pada saat dibutuhkan. Akses ini bukan hanya berupa bantuan sosial pangan, tindakan stimulus, dan bantuan dalam bentuk apapun, tetapi juga akses penuh terhadap perawatan kesehatan, baik layanan kesehatan dasar maupun pemeriksaan Covid-19.
2. Pengiriman PMI dalam masa kebiasaan baru (*new normal*) harus dipastikan bahwa mereka dikirim dalam kondisi aman dari kemungkinan tertular dan menularkan Covid-19, baik selama perjalanan maupun di negara tujuan. Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi kepada negara tujuan dan pemberi kerja bahwa PMI akan mendapat akses terhadap perawatan kesehatan, terutama terhadap Covid-19, dan dalam konteks luas adalah dukungan akses perlindungan/bantuan sosial, paling tidak selama pandemi masih berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cabegin, E.C.A. & Alba, M. (2014). *More or less consumption? The effect of remittances on Filipino household spending behaviour*. Dalam R.H. Adam Jr. & A. Ahsan (Ed.) *Managing International Migration for Development in East Asia*. Washington DC: World Bank.
- Fasani, F. & Mazza, J. (2020). *A vulnerable workforce: Migrant workers in the covid-19 pandemic*. JRC Technical Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

### Jurnal

- Abel, G.J. & Gietel-Basten, S. (2020). International remittance flows and the economic and social consequences of COVID-19. *Economy and Space*, 52(8), 1480-1482. <https://doi.org/10.1177%2F0308518X20931111>.
- Acharya, C.P & Leon-Gonzales, R. (2013). The impact of remittance on poverty and inequality: A micro-simulation study for Nepal. *Asian Journal of Empirical Research*, 3(9), 1061-1080.
- Aeni, N. (2019). Pengambilan keputusan menjadi pekerja migran Indonesia perempuan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 15(2), 107-120.
- Akpa, E.O., Awode, S.S., Okwu, A.T., & Oseni, I.O. (2020). The global financial crisis (GFC) and remittances received in Africa: Any lessons for Covid-19? *South-Eastern Europe Journal of Economics*, 2, 217-239.
- Alahmad, B., Kurdi, H., Colonna, K., Gasana, J., Agnew, J., & Fox, M.A. (2020). COVID-19 stressors on migrant workers in Kuwait: Cumulative risk considerations. *BMJ Global Health*, 5, 1-5. DOI:10.1136/bmjgh-2020-002995.
- Arifuzzaman, S.M., Al Mamun, S.A., Chowdhury, N.H., & Dewri, L.V. (2015). How the remittances from Bangladesh migrant workers are being utilized by their families at home? *IOSR Journal of Business and Management*, 17(4: III), 18-28.
- Afriska, A.E, Zulham, T., & Dawood, T.C. (2018). Pengaruh tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan remitansi terhadap PDB per kapita di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 231-248. DOI: 10.24815/jped.v4i2.12947.
- Azizi, S. (2021). The impacts of workers' remittances on poverty and inequality in developing countries. *Empirical Economics*, 60, 969-991. <https://doi.org/10.1007/s00181-019-01764-8>.

- Bachtiar, P.P. (2011). Migration outflow and remittance patterns in Indonesia: National as well as subnational perspectives. *Philippine Journal of Development*, XXXVIII(70), 27-55.
- Bhagat, R.B., R.S., R., Sahoo, H., Roy, A.K., & Govil, D. (2020). The COVID-19, migration and livelihood in India: Challenges and policy issues. *Migration Letters*, 17(5), 705-718. <https://doi.org/10.33182/ml.v17i5.1048>.
- Bhattarai, G. & Baniya, J. (2020). Nepali migrants worker amid covid-19 in major destination countries: A human security approach. *Tribhuvan University Journal Covid-19 Special Issue*, 34, 123-146. DOI: <https://doi.org/10.3126/tuj.v34i0.31545>.
- Caruso, G.D., Cucagna, M.E., & Ladronis, J. (2021). The distributional impacts of the reduction in remittances in Central America in COVID-19 times. *Research in Social Stratification and Mobility*, 71, 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2020.100567>.
- Chowdhury, M.B. & Chakraborty, M. (2021). The Impact of COVID-19 on the migrant workers and remittances flow to Bangladesh. *South Asian Survey*, 28(1), 38-56, DOI: 10.1177/0971523121995365.
- Cuecuecha, A. & Adams, H.R. (2016). Remittances, household investment and poverty in Indonesia. *Journal of Finance and Economics*, 4(3), 12-31. <http://dx.doi.org/10.12735/jfe.v4n3p12>.
- Dewandaru, B., Rahmadi, A.F.N., & Sya'idah, E.H. (2019). Pemanfaatan remitansi pekerja migran Indonesia serta peran usaha pekerja migran Indonesia purna untuk pembangunan desa asal. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2), 44-50. DOI: <https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>.
- Ebadi, N., Ahmadi, D., Sirkeci, I., & Quiñonez, H.M. (2018). The impact of remittances on food security status in the Global South. *Remittances Review*, 3(2), 135-150.
- Fahrizal, T., Aliasuddin, & Majid, M.S.A. (2021). Do remittances matter for poverty reduction in ASEAN? *Significan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(1), 13-30. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i1.19154>.
- Fonta, W.M., Ayuk, E.T., Chukwu, J.O., Onyukwu, O.E., Agu, C.C., & Omenwa, I.O. (2015). Dynamics of remittance utilization by Nigerian households. *Progress in Development Studies*, 15(4), 343-357.
- Gheasi, M. & Nijkamp, P. (2017). A brief overview of international migration motives and impacts, with specific reference to FDI. *Economies*, 5(31), 1-11.
- Gordon, R., Wadim, S. Yuriy, B., & Yuliia, T. (2018). Migrant remittances and their impact on the economic development of the Baltic states. *Geographica Pannonica*, 2(3), 165-175. DOI: 10.5937/gp22-16988.
- Hamidah, C. (2013). Dampak remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) luar negeri pada peningkatan investasi daerah asal. *Ekuilibrum. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 8(1), 1-13.
- Hidayat. (2017). Perlindungan hak tenaga kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam perspektif hak azasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 105-115.
- Imai, K., Gaiha, R., Ali, A., & Kaicker, N. (2014). Remittances, growth and poverty: New evidence from Asian countries. *Journal of Policy Modelling*, 36(3), 524-538.
- Indayani, S. & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201-2018. <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>.
- Karim, M.R., Islam, M.T., & Talukder, B. (2020). Covid-19's impacts on migrant workers from Bangladesh: In search of policy intervention. *World Development*, 136, 105-123.
- Kusunose, Y. & Rignall, K. (2018) The long-term development impacts of international migration remittances for sending households: Evidence from Morocco. *Migration and Development*, 7(3). 412-434, DOI: 10.1080/21632324.2018.1475383.
- Liton, M.R.I., Alauddin, Md., Sadekin, Md.N., & Saha, S. (2017). Overseas employment and remittance: Exploring the nexus in the context of Bangladesh. *Global Journal of Management and Business Research*, 17(1), 24-32.
- Maarif, S. (2018). Pemanfaatan dana remitansi tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Indramayu tahun 2012-2016 (studi kasus pada pemanfaatan dana remitansi di Kabupaten Indramayu). *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1), 22-42. DOI: 10.24235/inklusif.v3i1.2654.
- Maharja, A., Bauer, S., & Kneer, B. (2012). International migration, remittances and subsistence farming: Evidence from Nepal. *International Migration*,

- 51(s1), e249-e263. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2012.00767.x>.
- Marschke, M., Vandergeest, P., Havice, E., Kadfak, A., Duker, P., Isopescu, I., & MacDonnell, M. (2021). COVID-19, instability and migrant fish workers in Asia. *Maritime Studies*, 20, 87-99. <https://doi.org/10.1007/s40152-020-00205-y>.
- Masron, T.A., & Subramaniam, Y. (2018). Remittance and poverty in developing countries. *International Journal of Development Issues*, 17(3), 305-325.
- Mas'udah, S. (2019). Remittances and lifestyle changes among Indonesian overseas migrant workers' families in their hometowns. *Journal of International Migration and Integration*, 14(3), 475-492. <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00676-x>.
- McKenzie, S. & Menjivar, C. (2011). The meanings of remittances and gifts: Views of Honduras women who stay. *Global Networks: A Journal of Transnational Affairs*, 11(1), 63-81.
- Menni, C., Valdes, A.M., Freidin, M.B., et al. (2020). Real-time tracking of self-reported symptoms to predict potential COVID-19. *Nature Medicine*, 26, 1037-1040. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0916-2>.
- Misdawati & Siregar, S. (2020). Influence of remittance acceptance on povertalleviation in Indonesia. *Journal of Economic and Development Studies*, 3(1), 48-54. DOI: <http://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.65>.
- Murakami, E., Shimizutani, S., & Yamada, E. (2020). Projection of the effects of the COVID-19 pandemic on the welfare of remittance-dependent households in the Philippines. *EconDisCliCha*, 25, 1-14. <https://doi.org/10.1007/s41885-020-00078-9>.
- Mustapita, A.F., & Rizal, M. (2017). Analisis pola penggunaan remitan migrasi internasional secara produktif dan konsumtif di Kabupaten Malang. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 1(2), 6-10.
- Nahar, F.H. & Arsyad, M.N.M. (2017). Effect of remittances on poverty reduction: The case of Indonesia. *Journal of Indonesian Economic and Business*, 32(3), 163-177. <https://doi.org/10.22146/jieb.28678>.
- Nakamura, N. & Suzuki, A. (2021). COVID-19 and the intentions to migrate from developing countries: Evidence from online search activities in Southeast Asia. *Journal of Asian Economics*, 76. DOI:10.1016/j.asieco.2021.1013.
- Neef, A. (2020). Legal and social protection for migrant farm workers: Lessons from COVID-19. *Agriculture and Human Values*, 37, 641-642. <https://doi.org/10.1007/s10460-020-10086-w>.
- Noveria, M. (2017). Migrasi berulang tenaga kerja migran internasional: Kasus pekerja migran asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25-38.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143-174. DOI: 10.1080/00074918.2020.1798581.
- Posel, D., Oyenubi, A., & Kollamparambil, U. (2021). Job loss and mental health during the COVID-19 lockdown: Evidence from South Africa. *PLoS ONE*, 16(3), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249352>.
- Pratikto, R., Yazid, S., & Dewi, E. (2020). Enhancing the role of remittances through social capital: Evidence from Indonesian household data. *Asian Pasific Migration Journal*, 29(1), 30-54. DOI: <https://doi.org/10.1177/0117196820920401>.
- Rantung, J., Talumingan, C., & Tangkere, E.G. (2018). Alokasi remitansi pendapatan keluarga migran di Kecamatan Langowan Utara. *Journal of Agri-SocioEkonomi Unsrat*, 14(2), 237-246.
- Romdiati, H. (2012). Migrasi tenaga kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan dan arah migrasi, serta remitansi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(2), 27-53.
- Shimizutani, S. & Yamada, E. (2021). Resilience against the pandemic: The impact of COVID-19 on migration and household welfare in Tajikistan. *PLoS ONE*, 16(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257469>.
- Siddique, H.M.A., Shehzadi, I., Manzoor, M.R., & Majeed, M.T. (2016). Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? *Science International (Lahore)*, 28(2), 1519-1524.
- Simionescu, L. & Dumitrescu, D. (2017). Migrants remittances influence on fiscal sustainability in dependent economies. *Amfiteatru Economic*, 19(46), 640-653.
- Spinato, G., Fabbris, C., Polesel, J., et al. (2020). Alterations in smell or taste in mildly symptomatic outpatients with SARS-CoV-2 infection. *JAMA*, 323(20), 2089-2090. DOI: 10.1001/jama.2020.6771.

- Susilo, S. (2016). Beberapa faktor yang menentukan TKI dalam memilih negara tujuan sebagai tempat bekerja, studi di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 21(2), 38-46.
- Suyanto. (2018). Pemanfaatan remitan ekonomi dan ketergantungan migran kembali bekerja di luar negeri. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 30-37.
- Thapa, S. & Acharya, S. (2017). Remittances and household expenditure in Nepal: Evidence from Cross-Section Data. *Economies*, 5(2), 1-17. DOI: <https://doi.org/10.3390/economies5020016>.
- Uddin, Md.B. (2016). Can remittances impact economic development? Review from micro and macro perspectives. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 21(3), 97-102.
- Ukhtiyani, K. & Indartono, S. (2020). Impacts of Indonesian economic growth: Remittances migrant workers and FDI. *Journal of Economic and Policy*, 13(2), 280-291. DOI: <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.23543>.
- Ullah, AKM.A., Nawaz, F., & Chatteraj, D. (2021). Locked up under lockdown: the COVID-19 pandemic and the migrant population. *Social Sciences & Humanities Open*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100126>.
- Wadood, S.N. & Hossain, A. (2017). Microeconomic impact of remittances on household welfare: Evidences from Bangladesh. *Business and Economic Horizons*, 13(1), 10-29. DOI: <http://dx.doi.org/10.15208/beh.2017.02>.
- Wan Hassan, W.S., Dollah, R., & Herviani, D. (2016). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bugis dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sabah. *MANU: Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (PPIB)*, 22, 61-79. <https://doi.org/10.51200/manu.v22i0.10>.
- Wickramasinghe, A.A.I.N & Wimalaratana, W. (2016). International migration and migration theory. *Social Affairs*, 1(5), 13-32.
- Zmarai, M., Rahmattullah, P., Naqibullah, H., Ahad Z.A., & Safiullah, S. (2020). Remittance inflows and economic growth in Indonesia: An autoregressive distributed lag model (ARDL). *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(11), 4564-4583.
- Sumber Digital**
- Asare, J., Gebrewolde, T.M., Saab, M., Sandi, N., Sili, L., Wilkinson, N., & Yang, D. (2020). Remittance in the time of Covid-19: Challenges and opportunities for growth in developing countries. Diperoleh tanggal 17 Juli 2020, dari <https://www.theigc.org/publication/remittances-in-the-time-of-Covid-19/>.
- Bank Indonesia. (2020). Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia (SEKI). Diperoleh tanggal 18 Juli 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/eksternal/Contents/Default.aspx>.
- BNP2TKI. (2019). Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) tahun 2019. Diperoleh tanggal 11 Juni 2020, dari [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_19-02-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf).
- BP2MI. (2020). (2020d). Data penempatan dan perlindungan PMI periode april 2020. Diperoleh tanggal 10 Juli 2020, dari [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-05-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_APRIL\\_fix.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-05-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_APRIL_fix.pdf).
- HRWG. (2020). Dampak Covid-19 terhadap PMI: Dari PHK, gaji tidak dibayar, takut ditangkap, sampai kerja ekstra tanpa tambahan insentif. Diperoleh tanggal 5 Juli 2020, dari <https://hrwg.org/2020/05/10/siaran-pers-dampak-covid-19-terhadap-pmi-dari-phk-gaji-tidak-dibayar-takut-ditangkap-sampai-kerja-ekstra-tanpa-tambahan-insentif/>.
- ILO. (2020a). Social protection for migrant workers: A necessary response to the Covid-19 crisis. Diperoleh tanggal 7 Juli 2020, dari [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---soc\\_sec/documents/publication/wcms\\_748979.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_748979.pdf).
- ILO. (2020b). ILO warns of Covid-19 migrant 'crisis within a crisis. Diperoleh tanggal 17 Juni 2020, dari [https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_748992/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_748992/lang--en/index.htm).
- KNOMAD. (2020). Remittances in crisis: How to keep them flowing. Diperoleh tanggal 5 Juli 2020, dari <https://www.knomad.org/covid-19-remittances-call-to-action/>.
- Mohamedi, F. (2020). Covid-19 highlights vulnerability of Gulf's migrant workers. Diperoleh tanggal 28 Juni 2020, dari <https://castlereagh.net/Covid-19-highlights-vulnerability-of-gulfs-migrant-workers/>.
- Ratha, D., De, S., Kim, E.J., Plaza, S., Seshan, G., & Yameogo, N.D. (2020). Migration and development brief 32: COVID-19 crisis through a migration lens. Diperoleh tanggal 15 Juni 2020, dari <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33634/>

COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens.  
pdf?sequence=5&isAllowed=y.

World Bank. (2020a). Potential responses to the Covid-19 outbreak in support of migrant workers. *Living Paper*, version 3 (April 21, 2020). Diperoleh tanggal 2 Juli 2020, dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33625>.

World Bank. (2020b). Annual remittances data (update as October 2020). Diperoleh tanggal 4 November 2020, dari <https://worldbank.org/en/topic/labormarket/brief/migration-and-remittances>.